



PEMERINTAH
KOTA TARAKAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025

L K I P

DINAS PERIKANAN
KOTA TARAKAN
2026

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan sektor perikanan.

Penyusunan LKIP ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui laporan ini, Dinas Perikanan Kota Tarakan menyajikan informasi kinerja yang terukur, sistematis, dan akuntabel sebagai dasar evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025.

Tahun 2025 memiliki arti strategis bagi Pemerintah Kota Tarakan karena merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025–2029 serta Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, LKIP Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja tahunan, tetapi juga sebagai baseline kinerja dalam mengevaluasi

capaian pembangunan sektor perikanan pada periode perencanaan jangka menengah yang baru.

Pelaksanaan kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 berlangsung dalam konteks transisi perencanaan dan kepemimpinan daerah. Pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III, pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada Perjanjian Kinerja Awal yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan transisional. Selanjutnya, seiring dengan ditetapkannya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan definitif serta disahkannya RPJMD dan Rencana Strategis yang baru, dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar pengukuran kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025. Pembagian periode tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan kinerja serta konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja.

LKIP Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 menyajikan gambaran umum organisasi, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja, serta kesimpulan dan tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja. Melalui laporan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai capaian kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di bidang kelautan dan perikanan.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKIP ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan rekomendasi yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan pelaksanaan dan pelaporan kinerja pada masa yang akan datang. LKIP ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Tarakan, Januari 2026

Kepala Dinas Perikanan Kota Tarakan



Drs. ARDIANSYAH
NIP. 196707151086091001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan sektor perikanan di Kota Tarakan. Penyusunan LKjIP ini merupakan bagian dari implementasi awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025–2029 serta Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029, sehingga Tahun 2025 diposisikan sebagai tahun fondasi (baseline year) dalam penguatan manajemen kinerja sektor perikanan yang berorientasi pada hasil dan akuntabilitas.

Pelaksanaan kinerja Tahun 2025 berlangsung dalam konteks transisi perencanaan dan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah. Pada periode awal tahun, pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada dokumen perencanaan transisional, sementara pada Triwulan IV dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja seiring dengan ditetapkannya RPJMD dan Renstra Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Pendekatan ini memastikan kesinambungan pelaksanaan kinerja serta konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja.

Secara umum, capaian kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik hingga sangat baik. Pada sasaran strategis peningkatan produksi perikanan, produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya masing-masing mencapai 99,02 persen dan 97,38 persen dari target yang ditetapkan. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian tersebut berada pada kategori tinggi dan menunjukkan stabilitas kinerja sektor perikanan di tengah berbagai tantangan eksternal. Sementara itu, indikator pengolahan dan pemasaran hasil perikanan menunjukkan capaian yang sangat tinggi, mencapai 139,06 persen dari target, yang mencerminkan keberhasilan penguatan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk perikanan.

Pada aspek tata kelola sektor perikanan, indikator kepatuhan pelaku usaha perikanan mencapai 104,27 persen dari target, menunjukkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi perikanan. Di sisi lain, kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 90,62 dan Nilai SAKIP sebesar 78,40, yang keduanya melampaui target yang ditetapkan.

Dari sisi pengelolaan keuangan, realisasi anggaran Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 mencapai Rp11.016.634.402,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp11.891.377.242,00, dengan tingkat serapan anggaran sebesar 92,64 persen. Hasil analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah memenuhi kriteria efisiensi, yaitu capaian kinerja mencapai atau melampaui target dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih rendah dibandingkan capaian kinerja. Sementara itu, indikator produksi perikanan tangkap dan budidaya belum sepenuhnya memenuhi kriteria efisiensi karena capaian kinerja belum mencapai 100 persen, namun penggunaan anggaran tetap berada dalam kondisi terkendali dan tidak menunjukkan adanya inefisiensi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 juga menunjukkan keterpaduan yang baik antara program teknis sektor perikanan dan program penunjang tata kelola pemerintahan. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih memerlukan perhatian ke depan, antara lain optimalisasi sarana dan prasarana perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha perikanan, serta penguatan sistem data dan informasi kinerja sektor perikanan.

Ke depan, Dinas Perikanan Kota Tarakan akan terus memperkuat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta penguatan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan. Fokus kebijakan akan diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing sektor perikanan, pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dengan capaian kinerja Tahun 2025 yang secara umum berada pada kategori baik hingga sangat baik serta komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, Dinas Perikanan Kota Tarakan optimis bahwa sektor perikanan akan terus berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pencapaian visi pembangunan Kota Tarakan yang berkelanjutan.

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		i
Ikhtisar Eksekutif		iv
Daftar Isi		viii
BAB I	PENDAHULUAN	
A	Latar Belakang	1
B	Maksud dan Tujuan	2
C	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	4
D	Aparatur Pemerintah	8
E	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	11
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
A	Visi Kota Tarakan Tahun 2025–2029	33
B	Misi Kota Tarakan Tahun 2025–2029	34
C	Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota Tarakan	35
D	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	36
E	Program, Kegiatan, dan Alokasi Anggaran Tahun 2025	39
F	Indikator Kinerja Utama (IKU)	46
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
A	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	50
B	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	55
C	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra 2025–2029)	58

D	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional		62
E	Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan serta Upaya yang Dilakukan		67
F	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Realisasi Anggaran)		71
G	Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja		74
BAB IV	PENUTUP		
A	Kesimpulan		78
B	Saran		80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perikanan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Tarakan. Dengan potensi kelautan yang besar, upaya pengelolaan yang baik diperlukan untuk memastikan keberlanjutan sektor ini. Oleh karena itu, Dinas Perikanan Kota Tarakan bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai kebijakan guna meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat perikanan.

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan tugas, sistem akuntabilitas kinerja diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, capaian kinerja dalam satu tahun terakhir dievaluasi dan dianalisis untuk pengembangan kebijakan di masa mendatang.

Sektor perikanan di Kota Tarakan memiliki tantangan besar, di antaranya keterbatasan sarana dan prasarana, perubahan iklim yang berdampak pada hasil tangkapan ikan, serta fluktuasi harga yang mempengaruhi kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu,

langkah-langkah strategis telah dirancang untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan agar lebih mandiri dan berkelanjutan.

Peningkatan produksi perikanan juga menjadi fokus utama, dengan berbagai program yang diarahkan untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap dan budidaya. Selain itu, pengawasan sumber daya perikanan juga terus diperkuat guna mencegah eksploitasi berlebihan dan memastikan keberlanjutan sektor ini di masa depan.

Penyusunan laporan ini mengacu pada berbagai peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian kinerja serta rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

B. Maksud dan tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2025 bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Laporan ini mengungkap tahapan dan

proses yang telah dilaksanakan untuk mencapai target yang direncanakan, mencakup perencanaan kinerja, strategi pencapaian, metode pengukuran, analisis hasil, evaluasi capaian, serta rekomendasi perbaikan ke depan.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai capaian kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan selama tahun 2025, termasuk tingkat keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- b. Sebagai media evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan strategis di sektor kelautan dan perikanan.
- c. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target kinerja, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat guna di tahun mendatang.

- d. Memastikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan evaluasi yang lebih sistematis dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi program kerja Dinas Perikanan Kota Tarakan di masa depan.

C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kota Tarakan merupakan lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan Kota Tarakan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Tarakan.

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas

a. Kedudukan

Dinas Perikanan Kota Tarakan merupakan perangkat daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah.

b. **Tugas**

Dinas Perikanan Kota Tarakan bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

c. **Fungsi**

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perikanan Kota Tarakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang perikanan.
- 2) Merencanakan dan menyelenggarakan urusan perikanan serta pelayanan umum.
- 3) Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi di tingkat usaha pembudidaya perikanan.
- 4) Melaksanakan pembinaan teknis operasional berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh
- 5) Memberikan bimbingan teknis di bidang perikanan.
- 6) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan di bidang perikanan.
- 7) Melaksanakan dan mendampingi program serta kegiatan teknis berdasarkan tugas pembantuan yang diberikan.

- 8) Mengelola dan menata operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- 9) Melaksanakan pengujian, penerbitan, pembinaan, serta pengawasan perizinan usaha perikanan.
- 10) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Dinas Perikanan Kota Tarakan disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sedangkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Tarakan mengacu pada Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Tarakan.

Adapun struktur organisasi Dinas Perikanan Kota Tarakan terdiri dari:

- a. **Kepala Dinas**
- b. **Sekretariat**, yang membawahi:

- Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. **Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Perairan**, yang membawahi:
 - Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan
 - Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Nelayan
 - Sarana dan Prasarana Pelayanan Perikanan Tangkap
- d. **Bidang Perikanan Budidaya**, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang membawahi:
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - Seksi Pemberdayaan Usaha Budidaya
 - Seksi Produksi dan Kesehatan Ikan
- e. **Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)**

Struktur organisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tugas dan fungsi Dinas Perikanan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam mendukung program pemerintah di sektor perikanan.

Pada saat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perikanan Kota Tarakan ini disusun, struktur organisasi perangkat daerah telah mengalami penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1

Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional serta Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-VI/356/2024 tanggal 26 Juni 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Struktur organisasi yang berlaku saat ini adalah sebagaimana Gambar 1.1.

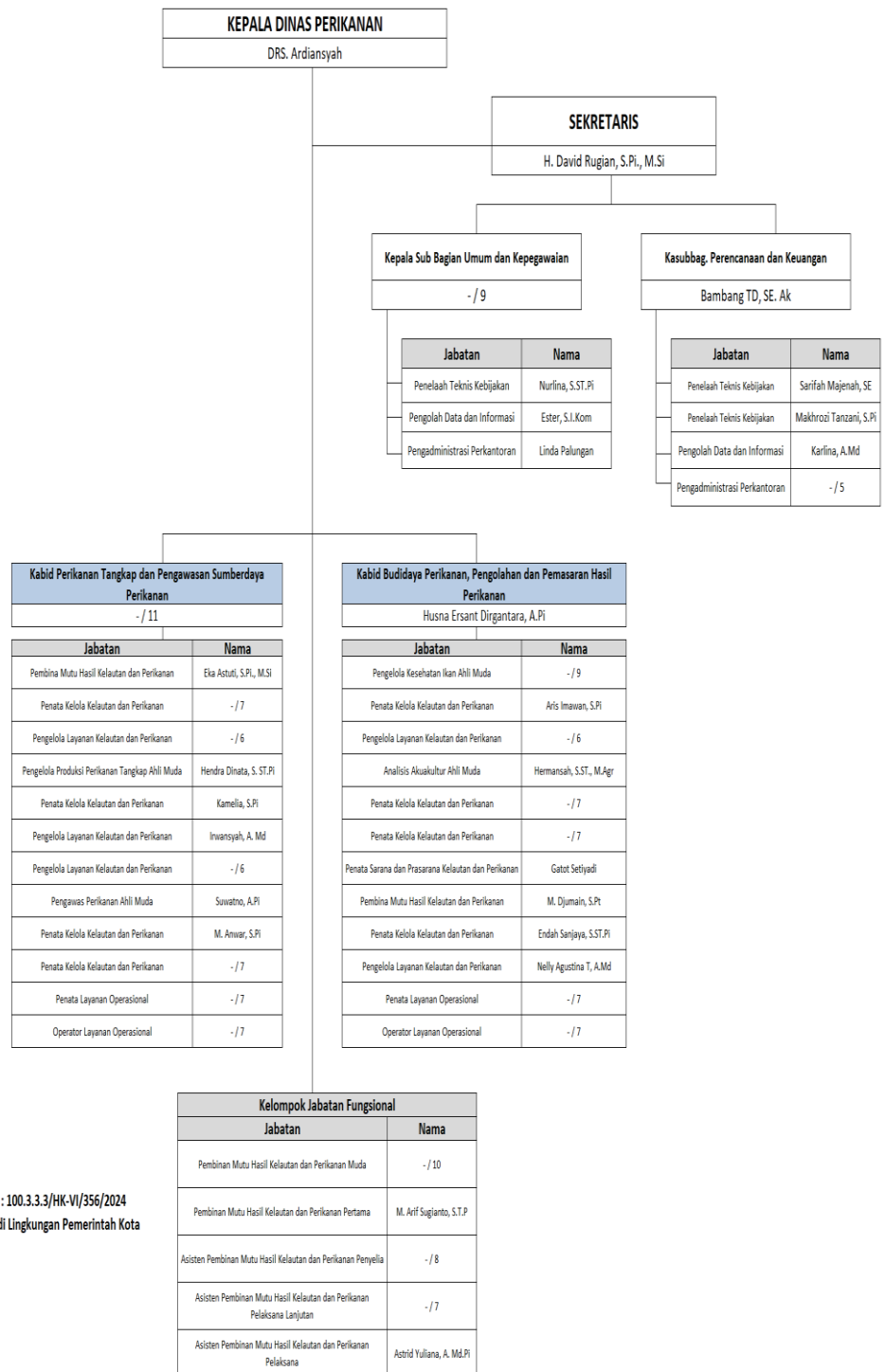
Penyesuaian struktur ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas serta fungsi Dinas Perikanan Kota Tarakan sesuai dengan kebijakan terbaru di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

D. Aparatur Pemerintah

Keberhasilan Dinas Perikanan Kota Tarakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat bergantung pada kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Sebagai unit kerja yang berperan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan di sektor perikanan, ketersediaan SDM yang profesional, berkompeten, dan berintegritas menjadi faktor utama dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program dan layanan kepada masyarakat. Per 31 Desember 2025, Dinas Perikanan Kota Tarakan memiliki total 50 pegawai, yang terdiri dari 38 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 12 pegawai non-ASN seperti yang terlihat pada Tabel 1.1

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Tarakan

DINAS PERIKANAN KOTA TARAKAN



Catatan :

Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor : 100.3.3.3/HK-VI/356/2024
Tanggal 26 Juni 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan

Kombinasi antara tenaga ASN dan Non-ASN ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor perikanan di Kota Tarakan

Tabel 1.1 Data PNS/ASN dan Non PNS/ASN di Lingkungan Dinas Perikanan Kota Tarakan per 31 Desember 2025

No	Bagian/Bidang	Jumlah ASN	L	P	Tingkat Pendidikan						Jumlah Non ASN
					SLTP	SLTA	D-3	D-4	S1	S2	
1	Kepala Dinas	1	L	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Sekretariat	9	5	6	-	3	1	1	5	1	2
3	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	7	9	2	1	4	1	1	4	-	4
4	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan	6	7	3	-	4	1	-	5	-	4
5	Jabatan Fungsional	7	5	2	-	-	1	2	2	2	-
6	UPT. PPMHP	4	3	3	-	3	1	1	1	-	2
7	Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL)	4	1	3	-	-	1	1	2	-	-
	Total ASN	38									
	Total Non ASN	12									
	Total ASN dan Non ASN	50									

E. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka menjamin ketepatan perencanaan dan efektivitas penyusunan program serta kegiatan, diperlukan identifikasi secara cermat terhadap permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kota Tarakan. Permasalahan dan isu strategis ini dianalisis berdasarkan capaian kinerja pelayanan, tantangan aktual, serta perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Permasalahan diartikan sebagai kesenjangan antara kondisi eksisting (realita/capaian saat ini) dengan kondisi ideal yang seharusnya dicapai sesuai standar pelayanan minimal, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), serta target pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. Sementara itu, isu strategis merujuk pada hal-hal pokok dan bersifat kritis yang berpotensi memberi dampak signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam jangka pendek maupun panjang.

1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kota Tarakan merupakan kesenjangan antara capaian aktual dengan kondisi

ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan ini muncul dari hasil evaluasi capaian kinerja 2024 serta kajian potensi dan tantangan sektoral yang dihadapi oleh nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan.

Produksi sektor perikanan di Kota Tarakan menunjukkan capaian yang fluktuatif dan belum sepenuhnya konsisten dengan target Renstra. Meskipun terdapat peningkatan pada produksi perikanan tangkap—dari 13.441 ton di 2020 menjadi 20.917 ton di 2024 (133,04% dari target)—namun pada perikanan budidaya justru terjadi penurunan capaian, dari 108,68% (2021) menjadi hanya 94,55% (2024). Capaian produksi pengolahan dan pemasaran perikanan bahkan mengalami lonjakan yang tidak proporsional di tahun 2024 (208,12%), yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara produksi hulu dan hilir, serta kemungkinan kurang akuratnya target awal. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun target secara kuantitatif tercapai, secara substansi dan kesinambungan masih menghadapi berbagai persoalan struktural di lapangan.

Permasalahan utama yang mendasari rendahnya stabilitas produksi meliputi terbatasnya infrastruktur perikanan, akses permodalan yang belum memadai, serta distribusi BBM bersubsidi yang tidak merata. Selain itu, minimnya pelatihan dan

pendampingan teknis kepada pelaku usaha, baik dalam budidaya maupun pengolahan, berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing. Fluktuasi harga yang tinggi, serta tingginya biaya produksi, memperburuk kepastian usaha. Di sisi kelembagaan, kapasitas kelompok nelayan dan pembudidaya masih terbatas, sehingga tidak mampu menjalankan fungsi ekonomi dan tata kelola secara mandiri. Pengawasan terhadap kegiatan budidaya dan pengolahan, termasuk UPI skala kecil, juga belum optimal dalam aspek mutu, legalitas, dan keamanan pangan.

Dari aspek tata kelola internal perangkat daerah, nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan dalam 4 tahun terakhir mengalami tren yang kurang stabil. Setelah bertahan pada predikat “B” di 2021 dan 2022, capaian turun menjadi “CC” di 2023 sebelum kembali ke “B” di 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya permasalahan sistemik dalam manajemen kinerja, khususnya terkait efektivitas sistem pengawasan, monitoring, dan evaluasi internal, serta rendahnya kompetensi dan motivasi SDM berbasis kinerja. Oleh karena itu, selain intervensi sektoral perikanan, perbaikan tata kelola internal perangkat daerah juga menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi, tantangan, dan permasalahan utama yang diperkirakan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam jangka menengah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Identifikasi isu strategis memiliki arti penting karena menjadi landasan dalam menetapkan arah kebijakan, strategi, serta prioritas pembangunan daerah agar tetap sejalan dengan dinamika lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penentuan isu strategis berfungsi memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah bersifat relevan, adaptif, serta berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan.

Penetapan isu strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan dilakukan melalui analisis komprehensif terhadap potensi dan permasalahan sektoral, hasil evaluasi capaian kinerja lima tahun terakhir, serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan kota. Proses ini bertujuan untuk menjamin konsistensi arah pembangunan sektor perikanan daerah dengan kebijakan pembangunan yang lebih luas, baik dalam lingkup regional maupun nasional.

Selain itu, penajaman isu strategis juga dilakukan dengan mengacu pada berbagai dokumen acuan, antara lain Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut, identifikasi isu strategis tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dan daya dukung lingkungan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa isu-isu strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan, mulai dari tantangan global seperti perubahan iklim dan dinamika perdagangan hasil perikanan, hingga isu nasional terkait ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Pada level regional, isu strategis mencerminkan kebutuhan pengelolaan sumber daya perikanan secara terpadu antarwilayah di Kalimantan Utara, sedangkan pada level lokal, perhatian utama diarahkan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan, optimalisasi potensi budidaya air payau dan laut, serta penguatan tata kelola pelayanan publik di bidang perikanan.

Dengan demikian, pemahaman terhadap isu strategis ini menjadi pijakan penting bagi Dinas Perikanan Kota Tarakan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang lebih terarah, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan daerah menuju sektor perikanan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat.

Isu Global

Isu global merupakan dinamika lintas negara yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan dan kondisi pembangunan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai perubahan yang terjadi pada tataran global, seperti krisis iklim, ketidakstabilan ekonomi dunia, pandemi, transformasi teknologi digital, serta pengetatan standar perdagangan internasional, memberikan dampak nyata terhadap pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan di tingkat lokal, termasuk di Kota Tarakan. Dalam menghadapi situasi tersebut, Dinas Perikanan Kota Tarakan perlu merumuskan kebijakan yang adaptif, terukur, dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional, sehingga mampu meminimalkan dampak negatif sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul.

Salah satu isu paling menonjol dalam konteks global adalah perubahan iklim yang menimbulkan berbagai implikasi terhadap sumber daya perairan. Perubahan pola cuaca, peningkatan suhu laut, naiknya muka air laut, serta meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem telah menyebabkan degradasi ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang. Kondisi ini berdampak langsung terhadap produktivitas perikanan tangkap dan budidaya, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas pendapatan masyarakat nelayan. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi kebutuhan strategis melalui penguatan sistem peringatan dini, konservasi sumber daya perairan, dan peningkatan kapasitas pelaku utama sektor perikanan.

Selain aspek lingkungan, gejolak ekonomi global turut memengaruhi stabilitas harga komoditas, fluktuasi permintaan ekspor hasil perikanan, serta daya beli masyarakat pesisir. Ketidakpastian ekonomi dunia menuntut adanya ketahanan ekonomi lokal yang tangguh. Dalam konteks ini, Dinas Perikanan Kota Tarakan perlu memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha perikanan melalui diversifikasi produk dan pasar, pengembangan rantai nilai berbasis komunitas, serta penguatan kelembagaan ekonomi rakyat agar mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar global.

Perkembangan teknologi digital juga menjadi salah satu isu strategis global yang memiliki dua sisi: peluang dan tantangan. Kemajuan teknologi informasi, otomasi, dan sistem data perikanan membuka kesempatan besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan sumber daya. Namun, hal ini sekaligus menuntut kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang memadai agar transformasi digital dapat berjalan optimal dan inklusif bagi pelaku usaha skala kecil.

Di sisi lain, meningkatnya standar mutu dan keamanan pangan dalam perdagangan internasional menuntut peningkatan daya saing produk perikanan daerah. Persyaratan sertifikasi mutu, keamanan pangan, dan *traceability* produk menjadi aspek penting agar hasil perikanan lokal dapat diterima di pasar global. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala kecil serta penguatan sistem pengawasan mutu menjadi langkah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar internasional.

Dalam konteks keberlanjutan, agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), transisi menuju energi bersih, serta dorongan terhadap ekonomi rendah karbon juga membawa implikasi terhadap sektor perikanan. Dinas Perikanan Kota Tarakan perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan tersebut ke

dalam kebijakan dan program, antara lain melalui rehabilitasi ekosistem mangrove, promosi konsumsi ikan sebagai sumber protein sehat dan bergizi, serta dukungan terhadap penggunaan teknologi ramah lingkungan dan efisiensi energi di sektor perikanan.

Dengan demikian, kesadaran terhadap isu-isu global tidak hanya penting sebagai bentuk respons terhadap dinamika eksternal, tetapi juga menjadi pijakan strategis bagi Dinas Perikanan Kota Tarakan dalam memperkuat ketahanan sektor perikanan daerah agar lebih tangguh, inovatif, dan berkelanjutan di tengah perubahan dunia yang semakin kompleks.

Isu Nasional

Dalam konteks pembangunan nasional, sektor kelautan dan perikanan memiliki posisi strategis sebagai penopang ketahanan pangan, sumber pertumbuhan ekonomi baru, dan pilar utama pembangunan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang menjadi fokus kebijakan nasional dan perlu diadopsi oleh Dinas Perikanan Kota Tarakan adalah **pendekatan ekonomi biru (blue economy)**, yaitu paradigma pembangunan yang mengedepankan keseimbangan antara peningkatan produktivitas ekonomi dengan pelestarian ekosistem laut dan pesisir. Pendekatan ini

menempatkan keberlanjutan sebagai dasar pengelolaan sumber daya perikanan, dengan prinsip efisiensi, inovasi, dan inklusivitas.

Penerapan ekonomi biru sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan pentingnya peningkatan nilai tambah produk perikanan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, konservasi kawasan pesisir, serta akselerasi transformasi digital di sektor kelautan dan perikanan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Perikanan Kota Tarakan perlu menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan program agar sejalan dengan kebijakan nasional yang tercermin dalam **Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP)** dan dokumen **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)**.

Berbagai isu strategis nasional yang relevan dengan konteks daerah antara lain pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan melalui konservasi, restocking, serta penerapan praktik budidaya ramah lingkungan. Upaya tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan perairan, sekaligus memastikan ketersediaan sumber daya ikan bagi generasi mendatang. Selain itu, peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha kecil menjadi prioritas melalui pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan kelembagaan usaha, serta perluasan akses terhadap teknologi dan permodalan.

Pengembangan industri perikanan berbasis ekonomi biru juga menjadi agenda penting, terutama dalam mendorong hilirisasi hasil tangkapan, industrialisasi rumput laut, dan penguatan unit pengolahan ikan skala kecil agar mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk daerah. Dalam hal tata niaga, penguatan sistem logistik perikanan menjadi kunci untuk mewujudkan efisiensi distribusi, kestabilan harga, dan keterjangkauan pasokan antarwilayah.

Isu strategis nasional lainnya adalah perlindungan kawasan pesisir dari degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan. Pengelolaan ruang pesisir yang terpadu dan berbasis ekosistem diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, perkembangan teknologi informasi juga mendorong perlunya transformasi digital dan inovasi teknologi perikanan, baik dalam aspek produksi, pengawasan, maupun pengelolaan data usaha, guna mendukung tata kelola yang transparan dan efisien.

Dalam konteks ketahanan pangan, sektor perikanan memiliki peran penting melalui peningkatan konsumsi ikan sebagai sumber protein berkualitas. Program nasional seperti *Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)* perlu terus diperkuat di tingkat daerah melalui kegiatan promosi, edukasi gizi, serta kolaborasi lintas

sektor. Selain itu, peningkatan tata kelola usaha perikanan dan sistem pengawasan yang efektif diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi, kualitas produk, serta keberlanjutan usaha.

Dengan mengintegrasikan pendekatan ekonomi biru ke dalam perencanaan daerah, Dinas Perikanan Kota Tarakan dapat membangun sektor perikanan yang produktif, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan daerah. Sinkronisasi antara arah kebijakan nasional dan pelaksanaan program di tingkat daerah menjadi landasan strategis dalam menghadapi dinamika global, nasional, dan kebutuhan lokal secara terpadu.

Isu Regional

Pada tataran regional, sektor perikanan di Kota Tarakan dihadapkan pada berbagai isu strategis yang berkaitan erat dengan dinamika lingkungan, tata ruang pesisir, serta efektivitas pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah Kalimantan Utara. Berbagai permasalahan lingkungan dan sosial-ekonomi yang muncul di kawasan pesisir menuntut respons kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, agar

pembangunan perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Salah satu isu utama yang perlu menjadi perhatian adalah maraknya praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing) yang berdampak pada keberlanjutan stok ikan dan keseimbangan ekosistem laut. Meskipun penanganan IUU Fishing menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat, Pemerintah Kota Tarakan tetap perlu berperan aktif dalam mendukung pengawasan usaha budidaya dan pengolahan hasil perikanan di wilayahnya, khususnya untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha perikanan berizin, legal, dan ramah lingkungan.

Selain itu, praktik budidaya perikanan yang dilakukan di luar kawasan yang ditetapkan, seperti kegiatan tambak atau penanaman rumput laut pada zona yang tidak sesuai peruntukan, menimbulkan tekanan ekologis dan sosial terhadap wilayah pesisir. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan penataan ruang pesisir di tingkat kota agar pemanfaatan ruang laut dan darat dapat berjalan secara harmonis dan berkelanjutan. Isu lain yang tidak kalah penting adalah kerusakan ekosistem mangrove yang disebabkan oleh konversi lahan dan aktivitas perikanan yang tidak terkendali. Sebagai kota pesisir dengan kawasan mangrove yang

cukup luas, Tarakan perlu memperkuat program rehabilitasi, perlindungan, dan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai penyangga alami terhadap abrasi, banjir rob, dan penurunan kualitas lingkungan.

Pencemaran perairan pesisir akibat limbah domestik maupun kegiatan usaha juga menjadi tantangan yang berpengaruh langsung terhadap kualitas air dan hasil budidaya. Hal ini menuntut penguatan sistem pengawasan lingkungan serta peningkatan kesadaran pelaku usaha agar menerapkan prinsip keberlanjutan dan pengelolaan limbah terpadu. Dalam konteks pemanfaatan sumber daya perikanan, masih terdapat praktik budidaya dan pengolahan yang belum sepenuhnya ramah lingkungan atau memperhatikan daya dukung ekosistem. Untuk itu, pendekatan ekonomi biru dan pengelolaan berbasis ekosistem perlu diarusutamakan dalam seluruh kebijakan dan program pengembangan perikanan daerah.

Selain isu-isu lingkungan, tantangan lain yang berkaitan langsung dengan efektivitas pelaksanaan program perangkat daerah adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi perikanan daerah. Nilai tambah hasil perikanan masih relatif rendah, pemanfaatan teknologi tepat guna terbatas, dan akses pasar bagi pelaku usaha kecil belum memadai. Kondisi ini menuntut peran aktif Dinas

Perikanan Kota Tarakan dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha, memfasilitasi kemitraan pasar, serta mengembangkan inovasi produk perikanan yang kompetitif dan bernilai jual tinggi.

Isu lainnya yang juga berimplikasi terhadap pengelolaan sumber daya perairan adalah ancaman terhadap habitat spesies laut kritis yang sebagian besar berada dalam wilayah perairan provinsi. Meskipun demikian, upaya pelestarian tetap perlu didukung di tingkat kota melalui peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi konservasi, serta penerapan prinsip pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Di samping itu, implementasi kebijakan ekologis di bidang budidaya, pengolahan hasil, dan pengawasan kualitas lingkungan masih belum optimal. Kelemahan ini dapat diatasi melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan sistem pengawasan terpadu yang efektif di tingkat kota.

Sejalan dengan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, beberapa isu strategis yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Tarakan antara lain mencakup transformasi menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru yang menekankan pada pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Kota Tarakan, sebagai wilayah kepulauan sekaligus daerah perbatasan, memiliki posisi strategis untuk mengembangkan

ekonomi biru melalui penguatan usaha perikanan tangkap, budidaya ramah lingkungan, dan pengolahan hasil yang efisien.

Isu lain yang menjadi prioritas adalah peningkatan produktivitas ekonomi daerah yang inklusif dan bernilai tambah, khususnya melalui hilirisasi produk perikanan dan diversifikasi usaha. Upaya ini perlu diiringi dengan pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah agar mampu menghasilkan produk yang kompetitif dan berorientasi pasar. Pemerataan konektivitas dan akses terhadap layanan dasar juga menjadi tantangan penting, terutama terkait dengan distribusi hasil perikanan, ketersediaan sarana produksi, infrastruktur pelabuhan perikanan, serta sistem logistik dingin (*cold chain*) yang mendukung rantai pasok berkelanjutan.

Dari sisi kelembagaan, tata kelola pemerintahan dan pengelolaan wilayah perbatasan yang efektif menjadi prasyarat bagi stabilitas ekonomi kelautan dan keamanan wilayah pesisir. Mengingat sebagian wilayah Kota Tarakan berbatasan langsung dengan perairan internasional, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan serta koordinasi lintas wilayah untuk mencegah pelanggaran dan menjaga keberlanjutan sumber daya.

Akhirnya, penguatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi elemen kunci dalam menjawab tantangan regional. Peningkatan kapasitas nelayan, pembudidaya, dan pelaku unit pengolahan ikan (UPI) skala kecil harus diarahkan pada penguasaan teknologi perikanan yang berkelanjutan serta pembentukan kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri, adaptif, dan tangguh menghadapi perubahan.

Isu Lokal (Perangkat Daerah)

Pada tingkat lokal, isu strategis yang dihadapi Dinas Perikanan Kota Tarakan berkaitan langsung dengan kapasitas internal perangkat daerah dalam mengelola potensi sumber daya perikanan secara optimal, berkelanjutan, dan berdaya saing. Sektor perikanan di Tarakan memiliki peran penting sebagai penopang perekonomian masyarakat pesisir, namun kontribusinya terhadap perekonomian daerah masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan perlunya transformasi yang lebih terarah menuju pengelolaan sumber daya perikanan yang produktif dan berbasis ekonomi biru.

Isu utama yang menjadi perhatian adalah peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui produksi berkelanjutan dan penerapan prinsip ekonomi biru. Hal ini menuntut perencanaan dan pengelolaan yang tidak hanya

berorientasi pada peningkatan volume produksi, tetapi juga memperhatikan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan sumber daya. Penerapan praktik budidaya yang ramah lingkungan, efisiensi energi, serta diversifikasi komoditas unggulan menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Selanjutnya, penguatan nilai tambah dan stabilisasi harga komoditas perikanan, khususnya rumput laut dan udang, menjadi tantangan strategis. Fluktuasi harga komoditas tersebut tidak hanya berdampak terhadap pendapatan pembudidaya, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan rantai nilai yang lebih kuat melalui peningkatan kapasitas produksi, fasilitasi kemitraan dengan pelaku industri, serta dukungan terhadap pembentukan sistem tata niaga yang transparan dan efisien di tingkat lokal.

Daya saing produk perikanan olahan berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu mendapat perhatian khusus. Produk perikanan lokal masih menghadapi kendala dalam hal kualitas, inovasi, dan akses pasar. Penguatan kapasitas pelaku usaha dalam bidang pengolahan, sertifikasi mutu, dan pemasaran digital menjadi langkah penting agar produk olahan perikanan Kota Tarakan dapat bersaing di pasar regional maupun nasional.

Dukungan terhadap pelatihan, promosi, dan pembinaan teknis bagi UMKM perikanan akan mendorong terbentuknya ekosistem industri kecil yang produktif dan berkelanjutan.

Selain itu, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku utama sektor perikanan merupakan prasyarat penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. Kelemahan dalam kelembagaan kelompok nelayan, pembudidaya, maupun unit pengolahan ikan menghambat efektivitas program pemberdayaan yang dijalankan pemerintah daerah. Upaya peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan kewirausahaan harus diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, disertai dengan penguatan koordinasi lintas instansi untuk memastikan keberlanjutan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan.

Permasalahan lain yang masih dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan kecil. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap biaya operasional dan produktivitas usaha perikanan tangkap. Dinas Perikanan perlu berperan aktif dalam memperluas jangkauan program bantuan energi, membangun kerja sama dengan lembaga penyalur, serta memperkuat advokasi kebijakan agar nelayan kecil memperoleh akses energi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, isu-isu lokal tersebut menggambarkan bahwa tantangan sektor perikanan Kota Tarakan tidak hanya berkaitan dengan faktor eksternal seperti dinamika pasar dan perubahan lingkungan, tetapi juga menyangkut aspek internal kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta ketersediaan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, Dinas Perikanan perlu mengarahkan kebijakan dan programnya pada penguatan fondasi internal organisasi, peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya, dan perluasan kolaborasi lintas sektor. Pendekatan yang komprehensif ini diharapkan dapat mendorong sektor perikanan Kota Tarakan menjadi lebih produktif, berdaya saing, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 merupakan landasan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor perikanan daerah. Perencanaan kinerja tersebut disusun secara bertahap dan adaptif dengan memperhatikan dinamika kebijakan pembangunan daerah, khususnya pada masa transisi kepemimpinan Pemerintah Kota Tarakan.

Pada awal Tahun Anggaran 2025, perencanaan kinerja Dinas Perikanan disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2026 sebagai dokumen perencanaan transisional yang diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Kota Tarakan pada masa kepemimpinan Penjabat Wali Kota. Selanjutnya, sejak tanggal 20 Februari 2025, Pemerintah Kota Tarakan dipimpin oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan definitif periode 2025–2030, yang kemudian menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan

Tahun 2025–2029 sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan RPJMD tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menetapkan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 pada bulan September 2025. Penetapan Renstra baru ini menjadi dasar penyesuaian arah kebijakan, sasaran, dan indikator kinerja Dinas Perikanan agar selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025–2029, Tahun 2025 memiliki peran strategis sebagai tahun fondasi (baseline year) dalam implementasi visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2025–2030. Fokus pelaksanaan kinerja diarahkan pada penyiapan kerangka kebijakan operasional, penajaman sasaran dan indikator kinerja, serta penguatan tata kelola perangkat daerah guna mendukung efektivitas pelaksanaan program prioritas sektor perikanan pada tahun-tahun berikutnya.

Perencanaan kinerja tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga sebagai instrumen manajemen kinerja yang memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Dengan demikian, LKIP Tahun 2025 menjadi

sarana akuntabilitas sekaligus evaluasi awal terhadap keselarasan pelaksanaan kinerja perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Fokus pelaksanaan kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan pada Tahun 2025 diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktivitas pelaku utama perikanan, penguatan kelembagaan dan akses pasar, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Seluruh arah kebijakan tersebut disusun untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah, yaitu *Tarakan Kota Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera*.

A. Visi Kota Tarakan Tahun 2025–2029

Visi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025–2029 adalah:

“Tarakan Kota Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera.”

Visi tersebut menegaskan bahwa sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan daerah yang

diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian, bersama sektor jasa, perdagangan, dan ekonomi kreatif. Arah pembangunan dalam visi ini menitikberatkan pada pengembangan potensi ekonomi pesisir dan kelautan yang berkelanjutan, peningkatan daya saing daerah melalui penguatan sumber daya manusia dan inovasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkeadilan.

B. Misi Kota Tarakan Tahun 2025–2029

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menetapkan sejumlah misi strategis. Salah satu misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan adalah:

“Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan.”

Misi ini menempatkan sektor perikanan sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kerangka tersebut, Dinas Perikanan berperan dalam menciptakan iklim usaha perikanan yang kondusif, memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir, serta memastikan pengelolaan sumber daya perikanan yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan.

C. Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota Tarakan

Tujuan pembangunan sektor perikanan Kota Tarakan periode 2025–2029 dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta berdaya saing. Sejalan dengan visi dan misi tersebut, Dinas Perikanan Kota Tarakan menetapkan dua tujuan strategis, yaitu meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap pembangunan daerah dan meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah.

Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran strategis berupa meningkatnya produksi sektor perikanan yang mencakup perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Secara kuantitatif, sasaran pembangunan jangka menengah diukur melalui beberapa indikator utama. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029/2030
Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap pembangunan daerah	Meningkatnya produksi sektor perikanan	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	10,53%	10,53 %	10,53 %	10,53 %	10,53 %	10,53%
		Produksi perikanan tangkap (ton)	20.917	21.335	21.762	22.197	22.641	23.556
		Produksi perikanan budidaya (ton)	213.453	219.857	226.453	233.247	240.244	254.875
		Produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (ton)	35.866	37.659	39.542	41.519	43.595	48.064
Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan publik sektor perikanan	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	67,67	69	70	71	72	73
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	73,0	75,0	78,0	81,0	85,0	88,3

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk komitmen kinerja antara Kepala Dinas Perikanan dan Wali Kota Tarakan dalam rangka mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2025 antara Kepala Dinas Perikanan dan Penjabat Wali Kota Tarakan. Perjanjian ini disusun dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2026 dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan serta pengukuran kinerja pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2025.

Seiring dengan penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan definitif periode 2025–2030 serta disahkannya RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025–2029, dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang ditetapkan pada bulan Oktober 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan tersebut disusun berdasarkan Renstra Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 dan digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025.

Pada Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025, indikator kinerja difokuskan pada pengukuran kesejahteraan pelaku utama perikanan dan kepatuhan usaha, antara lain melalui Indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan (NTPi), Nilai

Tukar Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (NTP2HP), Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha, serta Nilai SAKIP.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Meningkatnya produksi sektor perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2%
	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	3%
	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	5%
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah Dinas Perikanan	Nilai SAKIP	70
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75

Selanjutnya, dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, indikator kinerja disesuaikan untuk lebih menekankan pada pencapaian output dan outcome sektor perikanan, meliputi produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta Nilai SAKIP. Penyesuaian indikator tersebut dilakukan untuk meningkatkan relevansi pengukuran kinerja terhadap arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Rincian sasaran dan indikator kinerja tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

E. Program, Kegiatan, dan Alokasi Anggaran Tahun 2025

Sebagai bagian dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja tahun 2025, Dinas Perikanan Kota Tarakan telah menetapkan dan melaksanakan sejumlah program serta kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2025–2029. Seluruh program tersebut disusun secara terukur dan berorientasi pada hasil (outcome), dengan fokus utama untuk meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap pembangunan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun 2025 dilaksanakan secara selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025–2029, yang menempatkan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah berbasis sumber daya lokal.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2025 difokuskan pada empat program prioritas dan satu program pendukung. Keempat program prioritas mencakup: pengelolaan

perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Sementara itu, program pendukung difokuskan pada kegiatan administrasi, penunjang urusan pemerintahan, dan peningkatan efisiensi tata kelola kelembagaan perangkat daerah. Rincian program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, serta alokasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Anggaran Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025		BAGIAN / BIDANG
		OUTCOME / OUTPUT	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	
A. PROGRAM PRIORITAS					
1	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Jumlah Produksi Hasil Perikanan			
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2%	2.370.564.300,00	PTPSP
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Persentase Dokumen laporan	100%	68.806.200,00	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dokumen data dan informasi sumber daya ikan	1 Dokumen	68.806.200,00	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil	100%	2.301.758.100,00	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya	2.600 Orang	220.952.200,00	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang difasilitasi	5 Kelompok	4.000.000,00	

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025		BAGIAN / BIDANG
		OUTCOME / OUTPUT	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pemberdayaan usaha nelayan	7 Unit	2.076.805.900,00	
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	3%	2.865.102.469,00	BP2HP
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dokumen laporan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	100%	26.558.900,00	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	20 Kelompok	26.558.900,00	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase hasil kegiatan pembudidayaan ikan yang terlaksana	100%	2.838.543.569,00	
	Penyedia Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	73.094.800,00	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	2.484.169.669,00	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	12 Dokumen	87.724.500,00	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Pembudidaya yang memperoleh pembinaan	3 Unit	193.554.600,00	
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan	5%	92.545.800,00	PTPSP
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan	100%	92.545.800,00	
	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai	12 Pelaku Usaha	54.760.400,00	

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025		BAGIAN / BIDANG
		OUTCOME / OUTPUT	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	
		kewenangan kabupaten/kota			
	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	12 Pelaku Usaha	37.785.400,00	
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pemasaran produk perikanan budidaya	5%	1.265.097.808,00	BP2HP
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaksanaan penyediaan data	100%	60.983.600,00	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen data dan informasi pemasaran hasil perikanan	1 Dokumen	60.983.600,00	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terlaksana	100%	177.515.750,00	
	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Usaha / Kelompok yang difasilitasi	12 Unit	177.515.750,00	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan penyaluran bahan baku yang terlaksana	100%	1.026.598.458,00	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi	12 Pelaku Usaha	1.026.598.458,00	
TOTAL ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS				6.593.310.377,00	
B. PROGRAM PENDUKUNG					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat SAKIP	B	5.298.066.865,00	Sekretariat
	Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase dokumen laporan capaian kinerja	100%	8.993.860,00	

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025		BAGIAN / BIDANG
		OUTCOME / OUTPUT	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dan keuangan yang disusun tepat waktu			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.993.860,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran	100%	4.565.449.126,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	4.502.413.126,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	63.036.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	21.600.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 Paket	21.600.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100%	202.040.280,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.312.400,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	41.499.100,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	5.989.680,00	

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025		BAGIAN / BIDANG
		OUTCOME / OUTPUT	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	131.239.100,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terinput dalam aplikasi e-BMD	100%	193.361.600,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	193.361.600,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	100%	97.800.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	97.800.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	100%	208.821.999,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	22.551.999,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	145.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	41.270.000,00	
TOTAL ANGGARAN PROGRAM PENDUKUNG				5.298.066.865,00	

Berdasarkan Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 didominasi oleh program-program prioritas yang mendukung peningkatan

produktivitas sektor perikanan tangkap dan budidaya, serta penguatan rantai nilai hasil perikanan melalui kegiatan pengolahan dan pemasaran. Proporsi anggaran terbesar dialokasikan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan pelaku utama perikanan, penyediaan sarana dan prasarana usaha, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan dan pembudi daya ikan. Sementara itu, program pendukung dengan total anggaran sebesar **Rp 5.298.066.865,00** diarahkan untuk menjamin keberlangsungan fungsi manajerial dan administratif organisasi, termasuk pengelolaan keuangan, sumber daya aparatur, serta pemeliharaan sarana pendukung operasional dinas.

Kombinasi antara program prioritas dan program pendukung ini mencerminkan strategi Dinas Perikanan Kota Tarakan dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan kinerja teknis sektor perikanan dengan penguatan aspek tata kelola dan akuntabilitas internal. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, pertumbuhan ekonomi daerah, serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan di Kota Tarakan.

F. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan sasaran strategis dan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan, diperlukan sistem pengukuran yang terstruktur, terukur, dan berorientasi hasil. Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsi sebagai alat utama untuk menilai capaian kinerja organisasi terhadap tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029.

Penyusunan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, serta relevansinya terhadap kondisi sektor perikanan di Kota Tarakan. Indikator ini mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas sektor perikanan, efisiensi pengelolaan sumber daya, peningkatan nilai tambah ekonomi, dan penguatan tata kelola kelembagaan publik.

IKU Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan pendekatan hasil (*outcome based performance*), yang mencakup lima dimensi utama: kontribusi ekonomi daerah dari sektor perikanan, peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, pertumbuhan volume pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

publik, serta peningkatan nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Rincian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kota Tarakan sesuai Renstra 2025–2029 disajikan pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kota Tarakan Berdasarkan Renstra Tahun 2025–2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Target 2025	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan terhadap Perekonomian Daerah	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	$(\text{Nilai tambah perikanan} \div \text{total PDRB}) \times 100\%$	Persen	10,53	Data BPS – sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Sekretariat & Bidang Perencanaan
2	Meningkatnya Produksi Sektor Perikanan	Produksi perikanan tangkap	$PP = \Sigma \text{ hasil tangkap (ton) per tahun}$	Ton	21.335	Data Statistik Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan
		Produksi perikanan budidaya	$PP = \Sigma \text{ hasil budidaya (ton) per tahun}$	Ton	219.857	Data Statistik Perikanan Budidaya	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	$PP = \Sigma \text{ hasil olahan dan pemasaran (ton) per tahun}$	Ton	37.659	Data Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
3	Meningkatnya Kepuasan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = (\Sigma \text{ skor unsur pelayanan} \div \text{skor ideal}) \times 100$	Indeks	75	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Sekretariat
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Berdasarkan LHE KemenPAN-RB	Nilai	70	LHE SAKIP	Sekretariat

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4 merupakan acuan utama dalam pengukuran capaian sasaran strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025. Setiap indikator disusun secara terukur, realistis, dan berorientasi hasil, dengan sumber data yang kredibel serta penanggung jawab yang jelas di tingkat bidang.

Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat sistem *performance-based management* (manajemen berbasis kinerja) di lingkungan Dinas Perikanan, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dapat berjalan secara terintegrasi dan akuntabel. Melalui penerapan indikator tersebut, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berdaya saing.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyajian akuntabilitas kinerja meliputi pengukuran capaian kinerja organisasi, perbandingan capaian kinerja dengan berbagai tolok ukur, serta analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025–2029 dan Renstra Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, hasil pengukuran kinerja pada tahun ini memiliki peran strategis sebagai **baseline kinerja** yang akan menjadi dasar evaluasi dan perbandingan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam periode perencanaan jangka menengah.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Tarakan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 sebagai bagian dari fase implementasi awal kinerja pada masa

transisi perencanaan dan kepemimpinan daerah. Pelaksanaan kegiatan pada periode tersebut berkontribusi terhadap pencapaian output sektor perikanan yang selanjutnya diakumulasikan dan dievaluasi dalam kerangka Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Pengukuran kinerja Tahun 2025 dilakukan secara periodik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang berlaku pada masing-masing periode, yaitu Perjanjian Kinerja Awal sebagai dasar pelaksanaan kinerja Triwulan I sampai dengan Triwulan III, serta Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai dasar pengukuran kinerja Triwulan IV Tahun 2025.

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun anggaran. Pengukuran ini dimaksudkan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi sekaligus mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan.

Dalam rangka memberikan interpretasi yang objektif dan terukur terhadap capaian kinerja, digunakan Skala Nilai Peringkat Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Skala penilaian tersebut digunakan sebagai dasar kategorisasi tingkat capaian kinerja berdasarkan persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria Penilaian
1	91 – ≥ 100	Sangat Tinggi
2	76 – < 90	Tinggi
3	66 – < 75	Sedang
4	51 – < 65	Rendah
5	0 – < 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan skala tersebut, capaian kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan diklasifikasikan ke dalam kategori Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Klasifikasi ini menjadi dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai bahan evaluasi dan perumusan langkah perbaikan kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2%	-0,98	99,02	Sangat Tinggi
		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	3%	-2,62	97,47	Sangat Tinggi
		Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	5%	+39,06	139,06	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	+20,83	120,83	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP	69	+13,62	113,62	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Perikanan Kota Tarakan, Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2, secara umum capaian kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat tinggi,

dengan seluruh indikator kinerja utama mencapai tingkat realisasi di atas 90 persen dari target yang telah ditetapkan.

Pada sasaran strategis *Meningkatnya Produksi Perikanan*, indikator persentase peningkatan produksi perikanan tangkap menunjukkan capaian kinerja sebesar 99,02 persen, yang berada dalam kategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa realisasi produksi perikanan tangkap pada Tahun 2025 telah mendekati target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat dinamika lapangan yang memengaruhi capaian produksi, seperti faktor cuaca dan kondisi operasional nelayan.

Indikator persentase peningkatan produksi perikanan budidaya mencapai capaian kinerja sebesar 97,47 persen, juga berada dalam kategori Sangat Tinggi. Capaian ini mencerminkan bahwa kegiatan budidaya perikanan yang dilaksanakan telah berjalan efektif dan mampu mendukung peningkatan produksi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja.

Selanjutnya, indikator persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan menunjukkan capaian kinerja sebesar 139,06 persen, atau melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja yang melebihi 100 persen ini menunjukkan adanya optimalisasi pelaksanaan kegiatan

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, peningkatan partisipasi pelaku usaha, serta efektivitas dukungan program yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kota Tarakan.

Pada sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah*, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai capaian kinerja sebesar 120,83 persen, yang berada dalam kategori Sangat Tinggi. Capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor perikanan serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kota Tarakan.

Selain itu, indikator Nilai SAKIP juga menunjukkan capaian kinerja sebesar 113,62 persen, dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, termasuk dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi internal yang semakin terstruktur dan konsisten.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kota Tarakan telah mampu melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Capaian kinerja Tahun 2025 ini sekaligus menjadi baseline kinerja yang

penting sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kinerja pada periode perencanaan berikutnya dalam kerangka RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025–2029.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan untuk menilai konsistensi, dinamika, serta arah perkembangan kinerja sektor perikanan di Kota Tarakan. Analisis ini menjadi penting dalam rangka mengidentifikasi tren kinerja, baik yang menunjukkan peningkatan maupun penurunan, serta untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3, data kinerja periode Tahun 2021–2024 digunakan sebagai gambaran historis capaian kinerja sektor perikanan. Sementara itu, capaian kinerja Tahun 2025 diposisikan sebagai **baseline kinerja** dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029, sehingga capaian pada tahun ini akan menjadi titik awal evaluasi dan perbandingan kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam periode perencanaan jangka menengah.

Pada indikator **produksi perikanan tangkap**, realisasi produksi menunjukkan fluktuasi selama periode Tahun 2021–2024, dengan penurunan signifikan pada Tahun 2022, kemudian mengalami peningkatan kembali hingga Tahun 2024. Pada Tahun 2025, produksi perikanan tangkap tercatat sebesar **21.126 ton**, yang relatif stabil dan sedikit meningkat dibandingkan Tahun 2024. Capaian ini menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan kinerja subsektor perikanan tangkap yang didukung oleh pelaksanaan program pembinaan dan fasilitasi kegiatan penangkapan ikan.

Indikator **produksi perikanan budidaya** juga menunjukkan dinamika kinerja yang relatif stabil selama periode Tahun 2021–2025. Setelah mengalami penurunan pada Tahun 2022, produksi perikanan budidaya kembali meningkat pada Tahun 2023 dan relatif terjaga pada Tahun 2024 dan Tahun 2025, dengan realisasi sebesar **214.286 ton** pada Tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan keberlanjutan kegiatan budidaya perikanan serta adaptasi pelaku usaha terhadap tantangan produksi yang ada.

Sementara itu, indikator **produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan** menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Realisasi produksi pada subsektor ini meningkat tajam sejak Tahun 2024 dan berlanjut pada Tahun 2025 dengan capaian sebesar

53.370 ton. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya penguatan kapasitas pengolahan, perluasan akses pemasaran, serta meningkatnya peran pelaku usaha dalam rantai nilai perikanan di Kota Tarakan.

Pada aspek tata kelola dan pelayanan publik, indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** baru mulai diukur secara sistematis pada Tahun 2025 dengan nilai **90,62**. Nilai ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kota Tarakan, sekaligus menjadi nilai dasar (baseline) untuk pengukuran dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun-tahun selanjutnya.

Selanjutnya, indikator **Nilai SAKIP** menunjukkan adanya tren peningkatan kinerja akuntabilitas instansi pemerintah. Setelah mengalami penurunan pada Tahun 2022, nilai SAKIP kembali meningkat pada Tahun 2023 dan mengalami peningkatan yang signifikan pada Tahun 2024 dengan nilai **78,40**. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, khususnya dalam aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kinerja

sektor perikanan dan akuntabilitas organisasi Dinas Perikanan Kota Tarakan berada pada tren yang **positif dan berkelanjutan**. Capaian Tahun 2025 sebagai tahun awal pelaksanaan RPJMD dan Renstra periode 2025–2029 memberikan dasar yang kuat bagi peningkatan kinerja pada periode perencanaan jangka menengah selanjutnya.

Tabel 3.3. Tren Capaian Kinerja Produksi Perikanan Tahun 2021–2025

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Produksi perikanan tangkap	Ton	21.024	16.939	17.252	20.917	21.126
2	Produksi perikanan budidaya	Ton	211.861	201.727	221.125	213.453,10	214.286
3	Produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Ton	17.358	17.621	17.826	35.866	53.370
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	-	-	90,62
5	Nilai SAKIP	Nilai	64,58	66,51	58,71	67,67	78,40

Sumber: Dinas Perikanan Kota Tarakan, Tahun 2025

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra 2025–2029)

Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan

Kota Tarakan Tahun 2025–2029 dilakukan untuk menilai tingkat keselarasan capaian kinerja pada tahun pertama pelaksanaan Renstra dengan arah dan sasaran strategis jangka menengah yang telah dirumuskan. Analisis ini menjadi penting untuk memastikan bahwa strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap awal Renstra telah berada pada jalur pencapaian target lima tahunan.

Sebagai tahun awal pelaksanaan Renstra, capaian kinerja Tahun 2025 diposisikan sebagai baseline kinerja yang memberikan gambaran awal mengenai capaian sasaran strategis dan menjadi dasar penyesuaian strategi pada tahun-tahun berikutnya dalam periode perencanaan jangka menengah. Hasil perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.4.

Berdasarkan data pada Tabel 3.4, indikator **produksi perikanan tangkap** menunjukkan realisasi sebesar **21.126 ton** atau mencapai **99,02 persen** dari target Renstra Tahun 2025 sebesar **21.335 ton**. Meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, realisasi produksi perikanan tangkap berada pada tingkat yang sangat mendekati target dan menunjukkan kinerja yang relatif stabil pada tahun awal pelaksanaan Renstra.

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Renstra 2025–2029

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
1	Produksi perikanan tangkap (Ton)	21.335	21.126	99,02	Belum sepenuhnya mencapai target
2	Produksi perikanan budidaya (Ton)	219.857	214.286	97,47	Belum sepenuhnya mencapai target
3	Kepatuhan pelaku usaha perikanan (Indeks)	75	78,2	104,27	Melampaui target
4	Produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Ton)	37.659	52.370	139,06	Melampaui target
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	75	90,62	120,83	Melampaui target
6	Nilai SAKIP (Nilai)	69	78,40	113,62	Melampaui target

Sumber: Dinas Perikanan Kota Tarakan, Tahun 2025

Indikator **produksi perikanan budidaya** mencapai realisasi sebesar **214.286 ton**, atau **97,47 persen** dari target Renstra Tahun 2025 sebesar **219.857 ton**. Capaian ini mengindikasikan bahwa kinerja subsektor perikanan budidaya telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan penguatan strategi dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara penuh pada tahun-tahun selanjutnya.

Pada indikator **kepatuhan pelaku usaha perikanan**, realisasi capaian indeks sebesar **78,2** telah melampaui target Renstra Tahun

2025 sebesar **75**, dengan capaian kinerja mencapai **104,27 persen**. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kesadaran pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator **produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan** menunjukkan capaian kinerja yang sangat signifikan, dengan realisasi sebesar **52.370 ton** atau **139,06 persen** dari target Renstra Tahun 2025 sebesar **37.659 ton**. Capaian yang melampaui target ini mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas pengolahan, perluasan jaringan pemasaran, serta penguatan peran subsektor hilir perikanan dalam mendukung peningkatan nilai tambah produk perikanan.

Selanjutnya, indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** mencapai nilai **90,62**, atau **120,83 persen** dari target Renstra Tahun 2025 sebesar **75**. Capaian ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kota Tarakan, serta mencerminkan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Pada indikator **Nilai SAKIP**, realisasi Tahun 2025 mencapai nilai **78,40**, atau **113,62 persen** dari target Renstra Tahun 2025 sebesar

69. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya dalam aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang semakin terintegrasi dan berorientasi pada hasil.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai atau melampaui target Renstra Tahun 2025. Capaian ini memberikan indikasi positif terhadap efektivitas strategi dan kebijakan yang diterapkan pada tahun pertama pelaksanaan Renstra, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya dalam periode perencanaan jangka menengah.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Perbandingan antara realisasi kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 dengan standar atau target nasional dilakukan untuk menilai posisi dan kontribusi kinerja daerah dalam konteks pembangunan sektor perikanan secara nasional. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai daya

saing kinerja daerah, tingkat keselarasan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, serta ruang peningkatan kinerja yang masih dapat dioptimalkan pada periode perencanaan berikutnya.

Sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5, perbandingan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja yang memiliki keterkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta indikator tata kelola dan pelayanan publik yang mengacu pada pedoman nasional yang berlaku.

Pada indikator **produksi perikanan tangkap**, realisasi produksi Kota Tarakan Tahun 2025 sebesar **21.126 ton** memberikan kontribusi sebesar **0,09 persen** terhadap target produksi perikanan nasional Tahun 2025 sebesar **24.580.000 ton**. Kontribusi tersebut mencerminkan peran Kota Tarakan sebagai bagian dari sistem produksi perikanan nasional, dengan karakteristik wilayah dan skala produksi yang berbeda dibandingkan daerah sentra perikanan nasional.

Indikator **produksi perikanan budidaya** menunjukkan realisasi sebesar **214.286 ton**, dengan kontribusi sebesar **0,87 persen** terhadap target nasional sebesar **24.580.000 ton**. Kontribusi ini relatif lebih besar dibandingkan subsektor perikanan tangkap, yang

menunjukkan potensi subsektor budidaya sebagai salah satu pengungkit utama kontribusi daerah terhadap produksi perikanan nasional.

Pada indikator **kepatuhan pelaku usaha perikanan**, capaian indeks sebesar **78,2** menunjukkan tingkat pencapaian sebesar **95,37 persen** terhadap target nasional IKU KKP Tahun 2025 sebesar **82**. Capaian ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan di Kota Tarakan telah mendekati standar nasional, meskipun masih diperlukan penguatan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan untuk menutup kesenjangan capaian yang masih ada.

Untuk indikator **produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan**, tidak terdapat target nasional yang secara spesifik ditetapkan sebagai IKU nasional Tahun 2025. Oleh karena itu, analisis pada indikator ini difokuskan pada tren peningkatan kinerja daerah. Realisasi produksi sebesar **52.370 ton** pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mencerminkan penguatan subsektor hilir perikanan dan peningkatan nilai tambah produk perikanan di tingkat daerah.

Pada aspek pelayanan publik, indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** mencapai nilai **90,62**, atau **118,29 persen** dibandingkan standar mutu pelayanan nasional sebesar **76,61** (mutu B/“Baik”) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Dinas Perikanan Kota Tarakan telah berada pada kategori **sangat baik** dan melampaui batas minimal standar pelayanan nasional.

Selanjutnya, indikator **Nilai SAKIP** mencapai nilai **78,40**, atau **112,00 persen** dibandingkan ambang batas predikat **BB** sebesar **70** sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja di Dinas Perikanan Kota Tarakan telah melampaui standar minimal nasional dan berada pada tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat baik.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan telah selaras dengan kebijakan dan target nasional, khususnya pada aspek tata kelola dan pelayanan publik. Sementara itu, pada indikator produksi sektor perikanan, kontribusi daerah terhadap capaian nasional masih bersifat proporsional sesuai dengan karakteristik dan skala wilayah, serta

memberikan ruang yang jelas bagi peningkatan peran daerah melalui penguatan subsektor unggulan pada periode perencanaan berikutnya.

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional

No	Indikator	Capaian 2025	Target Nasional	Perbandingan (%)	Analisis
1	Produksi perikanan tangkap	21.126 ton	24.580.000 ton	0,09%	Kontribusi produksi tangkap Kota Tarakan terhadap target produksi perikanan nasional (IKU KKP 2025). (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
2	Produksi perikanan budidaya	214.286 ton	24.580.000 ton	0,87%	Kontribusi produksi budidaya Kota Tarakan terhadap target produksi perikanan nasional (IKU KKP 2025). (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
3	Kepatuhan pelaku usaha perikanan	78,2 (indeks)	82 (indeks)	95,37%	Nilai kepatuhan mendekati target nasional IKU KKP 2025; perlu penguatan pembinaan dan pengawasan untuk mengejar gap. (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
4	Produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	52.370 ton	—	—	Target nasional spesifik untuk indikator “produksi pengolahan & pemasaran” tidak dinyatakan sebagai IKU nasional pada sumber target 2025 yang digunakan; analisis difokuskan pada tren peningkatan daerah. (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,62	76,61 (mutu B/ “Baik”)	118,29%	IKM berada pada mutu pelayanan sangat baik dan melampaui batas minimal mutu “Baik” sesuai pedoman PermenPANRB 14/2017. (dinkominfo.purbalinggakab.go.id)
6	Nilai SAKIP	78,40	70 (ambang predikat BB)	112,00%	Nilai SAKIP melampaui ambang predikat BB (70–80) ; menunjukkan akuntabilitas kinerja telah berada pada level sangat baik. (KemenPAN-RB)

Sumber: Dinas Perikanan Kota Tarakan dan KKP (Target IKU 2025), serta pedoman PermenPANRB (IKM & SAKIP).

E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan serta Upaya yang Dilakukan

1. Analisis Penyebab Keberhasilan

Secara umum, kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik hingga sangat baik, terutama pada indikator yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, kepatuhan pelaku usaha perikanan, kepuasan masyarakat, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

a. Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan prioritas

Program dan kegiatan yang dilaksanakan telah selaras dengan sasaran strategis dan kebutuhan sektor perikanan daerah, khususnya pada penguatan hilirisasi perikanan, pembinaan pelaku usaha, serta peningkatan kualitas tata kelola kinerja. Hal ini tercermin dari capaian produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang melampaui target Renstra serta kontribusi positif terhadap target nasional.

b. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan akses pasar

Upaya fasilitasi pemasaran, pendampingan UMKM perikanan, serta optimalisasi sarana pengolahan hasil perikanan telah mendorong peningkatan volume produksi

dan nilai tambah produk perikanan. Kondisi ini menjadi faktor utama keberhasilan indikator produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

c. Penguatan pembinaan dan pengawasan sektor perikanan

Pembinaan yang berkelanjutan serta pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha perikanan berkontribusi terhadap capaian indeks kepatuhan yang berada di atas target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi perikanan.

d. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kinerja

Implementasi standar pelayanan, pemanfaatan hasil survei kepuasan masyarakat sebagai dasar perbaikan layanan, serta penguatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah mendorong peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP. Capaian ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

2. Analisis Penyebab Kinerja yang Belum Optimal

Di sisi lain, beberapa indikator kinerja, khususnya produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya, belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, meskipun tingkat

capaian kinerjanya masih berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. **Faktor eksternal yang sulit dikendalikan**

Fluktuasi kondisi cuaca, dinamika lingkungan perairan, serta faktor alam lainnya berpengaruh terhadap aktivitas penangkapan dan siklus produksi perikanan budidaya. Faktor-faktor ini berdampak langsung pada volume produksi dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh perangkat daerah.

b. **Keterbatasan daya dukung dan sarana produksi**

Keterbatasan sarana dan prasarana produksi, baik pada subsektor perikanan tangkap maupun budidaya, masih menjadi kendala dalam meningkatkan produksi secara signifikan, terutama dalam jangka pendek.

c. **Karakteristik produksi perikanan yang bersifat musiman**

Produksi perikanan memiliki karakteristik musiman yang menyebabkan capaian produksi pada tahun berjalan tidak selalu meningkat secara linear, meskipun perencanaan dan pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan rencana.

3. Upaya yang Telah dan Akan Dilakukan

Sebagai tindak lanjut atas capaian kinerja tahun 2025, Dinas Perikanan Kota Tarakan telah dan akan melakukan beberapa upaya perbaikan dan penguatan kinerja, antara lain:

a. **Optimalisasi pembinaan dan pendampingan teknis**

Meningkatkan intensitas pendampingan teknis kepada nelayan dan pembudidaya, termasuk penerapan teknologi tepat guna dan pengendalian penyakit ikan, guna meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha perikanan.

b. **Penguatan sarana dan prasarana perikanan**

Mendorong pemenuhan dan optimalisasi sarana prasarana produksi perikanan melalui sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta pemanfaatan program bantuan yang tersedia.

c. **Peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja**

Melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja agar lebih adaptif terhadap dinamika sektor perikanan, serta memastikan indikator kinerja disusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan target nasional.

d. Penguatan tata kelola dan pelayanan publik

Melanjutkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi, survei kepuasan masyarakat, serta tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 secara umum telah berjalan efektif dan mendukung pencapaian sasaran strategis, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian dan perbaikan berkelanjutan. Upaya peningkatan kinerja akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan dan akuntabel.

F. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Realisasi Anggaran)

Analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja dan tingkat penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian antara hasil kinerja yang dicapai dengan sumber daya keuangan yang digunakan.

Pada Tahun 2025, analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran diposisikan sebagai **baseline pengukuran** bagi pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, hasil analisis ini memberikan gambaran awal mengenai pola pemanfaatan anggaran serta menjadi dasar dalam penguatan perencanaan dan pengendalian anggaran pada periode perencanaan berikutnya. Hasil perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Realisasi Anggaran serta Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)	Keterangan
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan tangkap	99,02	2.370.564.300,00	2.344.630.500,00	98,91	Belum efisien
		Produksi perikanan budidaya	97,38	2.865.102.469,00	2.748.061.430,00	95,92	Belum efisien
		Kepatuhan pelaku usaha perikanan	104,27	92.545.800,00	78.412.824,00	84,76	Efisien
		Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	139,06	1.265.097.808,00	1.231.731.202,00	97,36	Efisien
2	Meningkatnya Akuntabilitas PD	Indeks Kepuasan Masyarakat	120,83	5.298.066.865,00	4.613.798.446,00	87,08	Efisien
		Nilai SAKIP	113,62				
	Total		112,36	11.891.377.242,00	11.016.634.402,00	92,64	Efisien

Sumber: Dinas Perikanan Kota Tarakan, Tahun 2025

Berdasarkan kriteria yang digunakan, suatu indikator kinerja dinilai efisien apabila capaian kinerja mencapai 100 persen atau lebih dan tingkat penyerapan anggaran lebih rendah dibandingkan

capaian kinerja. Sebaliknya, indikator dinilai tidak efisien apabila capaian kinerja kurang dari 100 persen dan tingkat penyerapan anggaran lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja.

Mengacu pada hasil analisis Tabel 3.6, indikator kepatuhan pelaku usaha perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Nilai SAKIP memenuhi kriteria efisien. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja yang telah mencapai atau melampaui target dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih rendah dibandingkan capaian kinerja. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa hasil kinerja yang dicapai lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi anggaran yang digunakan.

Sementara itu Indikator produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya pada Tahun 2025 belum memenuhi kriteria efisiensi sebagaimana ditetapkan, karena capaian kinerja belum mencapai 100 persen. Namun demikian, tingkat penyerapan anggaran pada kedua indikator tersebut masih lebih rendah dibandingkan capaian kinerja yang dicapai, sehingga tidak menunjukkan adanya pemborosan anggaran. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik sektor perikanan yang dipengaruhi faktor eksternal serta keterbatasan daya dukung produksi. Temuan ini menjadi dasar bagi peningkatan efektivitas program dan optimalisasi capaian kinerja pada periode perencanaan berikutnya

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat indikator kinerja yang termasuk dalam kategori tidak efisien pada Tahun 2025. Sebagian besar indikator telah memenuhi kriteria efisiensi, sementara indikator lainnya masih memerlukan peningkatan capaian kinerja agar dapat memenuhi kriteria efisiensi pada periode Renstra berikutnya. Hal ini menegaskan bahwa penggunaan sumber daya keuangan Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 telah dikelola secara terkendali dan mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

G. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 yang berada pada kategori baik hingga sangat baik tidak terlepas dari dukungan beberapa program dan kegiatan utama yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis. Program dan kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini berkontribusi terhadap terjaganya stabilitas produksi perikanan tangkap melalui kegiatan pembinaan nelayan, pengawasan sumber daya perikanan, serta

pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan tangkap. Meskipun realisasi produksi belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, pelaksanaan program ini mampu menjaga tingkat produksi tetap berada pada capaian yang tinggi dan mendekati target Renstra.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program pengelolaan perikanan budidaya mendukung keberlanjutan usaha budidaya melalui kegiatan pendampingan teknis, pengendalian penyakit ikan, serta fasilitasi sarana produksi. Program ini berperan penting dalam menjaga keberlanjutan produksi budidaya di tengah berbagai tantangan teknis dan lingkungan.

c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini menjadi faktor utama keberhasilan pencapaian indikator produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang melampaui target. Kegiatan fasilitasi pengembangan UMKM perikanan, peningkatan kapasitas unit pengolahan, serta perluasan akses pemasaran telah mendorong peningkatan volume dan nilai tambah produk perikanan.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi regulasi, pembinaan

perizinan, dan pengawasan usaha perikanan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan indeks kepatuhan pelaku usaha. Program ini menunjukkan peran strategis dalam mendukung tata kelola sektor perikanan yang berkelanjutan dan tertib.

e. **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kinerja**

Program ini mencakup kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, serta penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Program tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP Dinas Perikanan Kota Tarakan.

2. Program dan Kegiatan yang Masih Memerlukan Penguatan

Di samping program dan kegiatan yang telah menunjang keberhasilan kinerja, terdapat beberapa program dan kegiatan yang masih memerlukan penguatan agar pencapaian kinerja dapat lebih optimal, khususnya pada indikator yang belum sepenuhnya mencapai target.

a. **Kegiatan peningkatan kapasitas produksi perikanan tangkap dan budidaya**

Kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas

produksi masih perlu diperkuat, baik dari sisi dukungan sarana prasarana, adopsi teknologi, maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku usaha perikanan.

b. Kegiatan mitigasi risiko produksi perikanan

Program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengantisipasi risiko akibat faktor cuaca, lingkungan, dan penyakit ikan perlu terus dikembangkan agar produksi perikanan lebih adaptif dan berkelanjutan.

c. Kegiatan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan

Optimalisasi sinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pemangku kepentingan terkait masih diperlukan untuk mendukung pencapaian target kinerja secara lebih komprehensif, terutama dalam pemenuhan sarana prasarana dan penguatan akses pasar.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 telah berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja. Namun demikian, optimalisasi dan penguatan terhadap program dan kegiatan tertentu masih diperlukan guna meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran strategis pada tahun-tahun berikutnya.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 merupakan bagian dari implementasi awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025–2029 serta Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Tahun 2025 berperan sebagai tahun fondasi (baseline year) dalam penguatan manajemen kinerja sektor perikanan yang berorientasi pada hasil, pengendalian kinerja, dan peningkatan akuntabilitas.

Pelaksanaan kinerja Tahun 2025 berlangsung dalam konteks transisi perencanaan dan kepemimpinan daerah, sehingga pengelolaan kinerja dilakukan secara adaptif namun tetap terjaga kesinambungannya. Pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III, pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada Perjanjian Kinerja awal yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan transisional. Selanjutnya, pada Triwulan IV dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja sebagai tindak lanjut atas penetapan RPJMD dan Renstra Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Pola

pelaksanaan tersebut memastikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja yang disajikan dalam Bab III, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025 telah mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Capaian kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja utama berada pada tingkat capaian yang tinggi hingga sangat tinggi, khususnya pada indikator pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, kepatuhan pelaku usaha, kepuasan masyarakat, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Capaian tersebut memberikan gambaran awal yang positif terhadap arah pencapaian target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2025–2029.

Di sisi lain, evaluasi kinerja juga menunjukkan bahwa beberapa indikator produksi perikanan tangkap dan budidaya belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, meskipun tingkat capaian kinerjanya masih berada pada kategori tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan karakteristik sektor perikanan, seperti kondisi lingkungan, keterbatasan sarana prasarana, serta dinamika produksi yang bersifat musiman.

Temuan ini menjadi dasar penting dalam perumusan strategi perbaikan kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Tahun 2025 menegaskan bahwa keterpaduan antara program teknis sektor perikanan dan program penunjang tata kelola pemerintahan memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pencapaian kinerja. Penguatan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja menjadi kunci dalam meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap pembangunan daerah.

B. Saran (Tindak Lanjut)

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, Dinas Perikanan Kota Tarakan merumuskan beberapa langkah perbaikan dan rekomendasi strategis guna meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya, sebagai berikut:

1. **Penguatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja**, melalui penyempurnaan indikator kinerja agar semakin selaras dengan Renstra 2025–2029, serta peningkatan validitas, konsistensi, dan ketepatan waktu penyediaan data kinerja.
2. **Peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan**, khususnya program yang berdampak langsung

terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

3. **Penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah**, melalui optimalisasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang tercermin dalam Indeks Kepuasan Masyarakat.
4. **Optimalisasi pemanfaatan sumber daya**, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya aparatur, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran strategis sektor perikanan.
5. **Peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor**, baik dengan perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi dan pusat, maupun pemangku kepentingan sektor perikanan, untuk mendukung keberlanjutan pembangunan sektor perikanan di Kota Tarakan.

Dengan pelaksanaan tindak lanjut tersebut, Dinas Perikanan Kota Tarakan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,

pertumbuhan ekonomi daerah, serta pencapaian visi pembangunan Kota Tarakan.